

NASKAH PUBLIKASI

**Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Non Fisik Desa Tahun 2016
(Studi Kasus Pada Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten
Bantul)**

Dikha Andrean

Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

NASKAH PUBLIKASI

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN NON FISIK
DESA TAHUN 2016**

Oleh:

DIKHA ANDREAN
20130520033

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

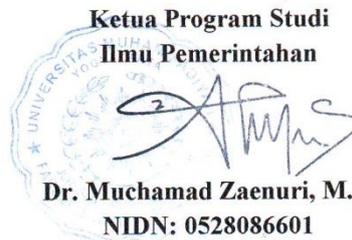

Erni Zuhriyati, SS., S.IP., MA
NIDN: 0515037601

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Cilia Furwaningsih, S.IP., M.Si
NIDN: 0522086901



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIDN: 0528086601

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas. Salah satu strategi yang harus dilakukan yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan metode-penelitian *kualitatif deskriptif*. Teknik Pengambilan sampel menggunakan *Wawancara dan Dokumentasi*, Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 8 narasumber. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Peranan Pemerintah Desa yaitu** (a) menerima aspirasi-aspirasi. (b) Pemerintah desa memberikan solusi dengan cara bertukar pikiran, (c) Upaya pemerintah mencegah masyarakat dalam hal rasa takut dengan cara memberikan bantuan kepastian hukum dan dorongan kepada masyarakat dengan aktualisasi dan penghargaan untuk masyarakat. **Partisipasi masyarakat yaitu** (a) partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan analisis kebutuhan berupa diskusi atau sosialisasi, (b) Tahap alternatif program pemerintah seperti kampung mataram, Beasiswa Warga, kartu sehat dan pengelolaan sampah (c) Tahap implementasi program, sudah terealisasi, (d) tahap evaluasi, hasil wawancara belum nampak adanya kegiatan evaluasi pada pembangunan non fisik di Desa Panggunharjo. **Pembangunan Desa Non fisik** antara lain (a) Bidang ekonomi, adanya pengembangan pengelolaan sampah dan kampung mataram (b) Bidang pendidikan, program beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu, (c) Bidang kesehatan, memberikan kartu sehat agar masyarakat memiliki akses kesehatan yang mudah. **Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Non Fisik Desa Panggunharjo** antara lain (a) Faktor Kepemimpinan, dibuktikan masyarakat mengalami perubahan (b) Faktor komunikasi, dengan kegiatan sosialisasi. **Simpulan:** Peranan Pemerintah Desa telah menjadi alat komunikasi, penyelesaian sengketa, peran sebagai terapi. Partisipasi masyarakat seperti di bidang ekonomi yaitu terealisasi program kampung mataram, dan pengelolaan sampah, bidang pendidikan, adanya beasiswa, dan bidang kesehatan adanya kartu sehat. **Saran:** Bagi pemerintah desa Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah Desa bagaimana peran pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa, yang perlu dilakukan pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa non fisik adalah melakukan bentuk evaluasi secara berkala pada setiap program

Kata Kunci : Pemerintah Desa, partisipasi masyarakat, Pembangunan Desa

LATAR BELAKANG

Kebijakan desentralisasi yang dicanangkan pemerintah melalui paket Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka peluang untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan cara memperpendek rentang pelayanan administrasi kepada masyarakat di daerah ([I Nyoman Sumaryadi](#), 2006:70).

Dalam kerangka otonomi daerah, komponen yang mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat adalah wilayah pedesaan. Di dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dilindungi oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi (pasal 28C ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 UUD 1945) dan wajib bagi negara untuk memenuhinya. Hak-hak masyarakat tersebut semakin diperkuat sejak diratifikasinya konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya oleh pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 2005. Konvensi tersebut salah satunya mewajibkan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan (pasal 12 dan 13).

Pentingnya mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan disebabkan sebagian masyarakat Indonesia sebagian besar tinggal di daerah pedesaan sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan di Indonesia yaitu membangun manusia yang seutuhnya sehingga pembangunan desa akan menjadi prioritas utama (Ginting, 2005:7).

Oleh karena itu, guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan program pemberdayaan salah satunya melalui program peningkatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat Desa Pangguhharjo. sebagai pembinaan dan pengkoordinasi jalannya roda pemerintahan, maka Pemerintah Desa Pangguhharjo melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengaktifan unit-unit kelembagaan pemerintah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif masyarakat.

Desa Panggungharjo dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa ini memiliki konsep pembangunan desa non fisik yang melibatkan partisipasi masyarakat. Program pembangunan non fisik yang ada di Desa Panggungharjo diantaranya pengelolaan ekonomis sampah, satu rumah satu sarjana, BUMDes, gapoktan dan demplot. Desa Panggungharjo pada tahun 2014 ditetapkan sebagai peraih Juara I Lomba Desa dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional 2014 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan kategori desa dengan pemberdayaan untuk pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada masyarakat. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan data potensi yang dimiliki suatu desa dan pengembangannya sejak awal 2012 hingga akhir 2013.

KERANGKA TEORI

Peranan Pemerintah Desa

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto 2002; Soekamto 1984: 237). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa bilamana masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan adalah Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), yang mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambil keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- b. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess)
- c. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan

ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh R.A. Santoso Sastropetro (1988:13) sebagai berikut: “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.” Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok.

Menurut Adi (2001:208), partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1) Tahap Assesment

Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

2) Tahap Alternative Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.

3) Tahap Pelaksanaan(Implementasi) Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.

4) Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil)

Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksudkan oleh peneliti, yakni keikutsertaan/keterlibatan masyarakat

dalam perencanaan dengan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, di mana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi di daerahnya sendiri, sehingga pembangunan yang nantinya dilaksanakan di daerah mereka betul-betul seperti yang mereka butuhkan.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa disimpulkan oleh peneliti adalah suatu bentuk perubahan yang ada di Desa, baik berupa perubahan secara fisik maupun non fisik yang bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Desa. Menurut CST Kansil dalam (Hasanah, 2015), pembangunan desa adalah “Pembangunan yang dilakukan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dan pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat desa memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.”

Pembangunan secara umum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan sarana dan prasarana, misalnya pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan tempat ibadah, pembangunan pasar, pembangunan drainase, dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Sedangkan pembangunan non fisik adalah Pembangunan non fisik merupakan pembangunan mental spiritual, misalnya penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian, dan lain sebagainya (Hasanah, 2015).

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode-penelitian *kualitatif deskriptif*. Teknik Pengambilan sampel menggunakan *Wawancara dan Dokumentasi*, Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 8 narasumber. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik menggunakan analisis data kualitatif.

Pembahasan

Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Non Fisik Tahun 2016 (Studi Kasus Pada Pembangunan BUMDes Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)

Wawancara dilakukan kepada beberapa pegawai Pemerintah Desa Panggungharjo sebagai pelaku peranan, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan beberapa permasalahan yang akan diteliti, sehingga jawaban tersebut sebagai data dalam bab ini. Wawancara juga dilakukan kepada beberapa masyarakat sebagai pelaku partisipasi terhadap pembangunan di desa Panggungharjo.

Peran Pemerintah Desa

Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik di Desa Panggungharjo dijabarkan lebih rinci dengan menggunakan teori peranan yang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Sentosa (2003), diantaranya peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi.

(a.) Peran Sebagai Alat Komunikasi

Dalam hasil wawancara tersebut telah tergambar bahwa pemerintah desa menjadi alat komunikasi bagi warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab. Makna pemerintah sebagai alat komunikasi dikuatkan oleh penelitian Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003) menyatakan bahwa dengan adanya komunikasi dari warga dan pemerintah desa maka akan membentuk Persepsi yang dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.

Peran komunikasi pemerintah dalam hal ini kepala desa untuk dapat menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembangunan desa. Peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara

timbang-balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan balai desa, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

(b.) Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam hasil penelitian di atas melalui wawancara dapat dilihat bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan salah satunya yaitu penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan proses identifikasi masalah kemudian pemerintah desa memberikan solusi dengan cara bertukar pikiran. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.

Menurut Amriani (2012) sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurnaningsih Amriani, 2012). Pemerintah desa memiliki kekuatan dalam melakukan penyelesaian sengketa.

Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*), Menurut Sarjono Sukanto (1984) bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

(c.) Peran Sebagai Terapi

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pemerintah sebagai terapi di wujudkan dengan upaya pemerintah mencegah masyarakat dalam hal rasa takut dengan cara memberikan bantuan kepastian hukum dan dorongan kepada masyarakat dengan aktualisasi dan penghargaan untuk masyarakat. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, ditanggulangi dengan suatu program. Terapi dengan cara memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari

masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif sehingga tersalurkan aktualisasi.

Pemerintah desa menjadi sebuah terapi untuk masyarakat agar merasa percaya diri untuk terus meningkatkan segala aspek seperti aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pembangunan non fisik dilakukan untuk masyarakat dengan adanya dukungan pemerintah desa agar dapat mencapai sesuai tujuan. Pemerintah desa sebagai alat terapi untuk memotivasi masyarakat agar meningkatkan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Partisipasi Masyarakat

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat Desa Panggungharjo saat pelaksanaan pembangunan desa, guna untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan dengan menggunakan tingkat partisipasi masyarakat menurut teori Adi (2001:208). Bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, ada 4 (empat) tingkat partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian ini terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul sebagai berikut:

(a.) Tahap Assesment

Pada tahapan ini mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Oleh sebab itu, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, dalam teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan bukan hanya dimulai pada saat rapat perencanaan ataupun pada implementasinya tetapi dalam hal ini masyarakat seharusnya berpartisipasi pada saat pengidentifikasian masalah.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dari informan digambarkan bahwa partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan analisis kebutuhan untuk mencapai pembangunan. Dalam kasus yang dijabarkan informan, informan telah berpartisipasi dalam menganalisis kebutuhan para petani sawah yaitu permasalahan limbah agar pemerintah desa mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemerintah Desa telah melakukan assesmen atau analisis kebutuhan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka pengembangan pembangunan non fisik agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Adi (2001) bahwa keterlibatan masyarakat dapat dilihat dalam tahap Assesment yaitu Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

Kondisi Desa dengan adanya limbah akan menjadi hambatan pembangunan non fisik seperti permasalahan yang timbul pada warga apabila limbah dibiarkan, akan menjadi permasalahan dalam bidang kesehatan, yang kaitannya dengan pembangunan non fisik. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan non fisik bukan hanya perencanaan, namun masyarakat ikut dalam pengidentifikasian masalah agar dicapai sebuah pemecahan masalah bersama pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Liwan (2016) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan pada tahap Assesment menggambarkan bahwa Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, dalam teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan bukan hanya dimulai pada saat rapat perencanaan ataupun pada implementasinya tetapi dalam hal ini masyarakat seharusnya berpartisipasi pada saat pengidentifikasian masalah.

(b.) Tahap Alternative Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa Panggunharjo Kecamatan Sewon, pembangunan non fisik yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh pemerintah desa melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua.

Berdasarkan hasil wawancara digambarkan bahwa pemerintah memiliki andil dalam menggali gagasan dengan melibatkan masyarakat agar diketahui masalah yang dihadapi dan solusi yang harus di atas dengan memikirkan beberapa program yang muncul karena partisipasi masyarakat guna memecahkan masalah di dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan tidak langsung serta merta diputuskan secara sepihak namun dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan dengan menggali gagasan yang mendalam semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung dengan baik dan didapatkan solusi pemecahan masalah dengan penggunaan alternatif program yang dirancang pemerintah desa untuk masyarakat.

Alternatif program dilaksanakan dengan kegiatan perencanaan. Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak.

Dalam pembangunan non fisik alternatif kegiatan dapat diwujudkan dengan merencanakan program yang berkaitan dengan peningkatan bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang peningkatan sosial ekonomi. Dalam bidang kesehatan pembangunan masyarakat direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan diadakannya penyuluhan dan pengobatan gratis untuk mendapatkan kesehatan, baik untuk bayi hingga lansia. Dalam

pembangunan di bidang pendidikan dapat berupa dukungan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat seperti bantuan beasiswa untuk masyarakat. Dalam bidang peningkatan sosial ekonomi dapat diwujudkan perencanaan kegiatan seperti pelatihan mengolah sampah dalam rangka memberikan bekal masyarakat agar menambah pendapatan ekonomi dari pengelolaan sampah.

(c.) Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Tahapan ini dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dapat dilihat keterlaksanaan program pembangunan non fisik diwujudkan pada peningkatan bidang sosial yang terwujud dalam bentuk *kampoeng mataraman*. Tahapan ini menilai pembangunan non fisik dalam bidang peningkatan sosial ekonomi yaitu area kampung untuk menyelenggarakan makanan agar masyarakat dapat meningkat pada status ekonomi dengan adanya area penjualan makanan dengan berbagai fasilitas merupakan usaha yang bergerak di jasa wisata edukasi dan kuliner berbasis masyarakat agraris. Bidang pendidikan pemerintah Desa memberikan beasiswa bagi warga berprestasi namun lemah ekonomi, dan Bidang kesehatan memberikan kartu sehat guna membantu meringankan warga yang lemah ekonomi”

Pelaksanaan implementasi program merupakan salah satu usaha pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan siklus yang terus menerus., dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada diharapkan masyarakat dapat diberdayakan. Untuk itu pemerintah melalui instansi terkait, memfasilitasi proses-proses pemberdayaan melalui berbagai program kemasyarakatan, pembinaan dan pemberian bantuan untuk menggairahkan pembangunan desa serta pemberian pelatihan keterampilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini dikuatkan dalam jurnal milik Harli (2013) bahwa Proses implementasi program kebijakan adalah rangkaian kegiatan tindak

lanjut yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah strategi maupun operasional. Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) unsur penting yang mutlak, yaitu (a) adanya program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan. (b) target group, yaitu sekelompok masyarakat yang menjadi sasaran yang diharapkan akan menerima program tersebut, perubahan atau peningkatan. (c) unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengolahan maupun pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

(d.) Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil)

Pada tahapan berikut ini dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Masyarakat ikut mengawasi dari laporan kegiatan dari segi program, waktu maupun dana yang digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas belum nampak adanya kegiatan evaluasi pada pembangunan non fisik di Desa Panggungharjo. Evaluasi program dapat dilakukan setelah dilakukan monitoring. Menurut PP 39/2006, disebutkan bahwa Monitoring merupakan kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal, dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang akan dipergunakan untuk Mengevaluasi kinerja program. Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkala, menganalisis data yang telah diperoleh dari Monitoring untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan rencana, dan sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Hasil penelitian wawancara pada tahap evaluasi belum tergambar adanya monitoring yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dalam hasil penelitian juga belum tergambar adanya evaluasi program yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan Desa

a. Pembangunan dibidang perekonomian

Ekonomi merupakan salah satu hal penting yang mendukung peningkatan taraf hidup manusia. Ekonomi juga memiliki keterkaitan dengan pembangunan sama dengan pendidikan. Tingkat ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi setiap pembangunan yang ada tidak terlepas pembangunan di desa. Ketika ekonomi di desa mengalami peningkatan maka akan berdampak kepada pembangunan desa yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara diketahui pembangunan desa dibidang ekonomi dengan adanya pengembangan BUMDes, bentuk pembangunan non fisik ini diwujudkan dalam pengelolaan sampah yang dulunya menjadi masalah bagi desa Panggunharjo. Desa ini memanfaatkan material sampah guna mendukung pembangunan desa non fisik dalam rangka meningkatkan kemajuan sosial ekonomi. Pembangunan masyarakat memberi manfaat untuk kemajuan sosial ekonomi.

Hasil penelitian ini sesuai teori Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2006) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Sedangkan menurut sondang P.Siagian (2008) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan masyarakat identik dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk mendukung pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan dengan pendekatan saja namun memecahkan masalah dibidangnya masing-masing. Dalam hal ini pembanguan dalam bidang ekonomi dengan cara adanya pengelolaan sampah yang diawali dengan pemberian model bergulir, pemerintah Desa juga tetap perlu menjadi penguatan kelembagan ekonomi masyarakat, penguatan SDM, penguatan sarana prasana. Pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi harus dilakukan secara konsisten dan tidak mendiskrimiasi ekonomi lainnya dengan cara

pendekatan kelompok. Pembangunan dalam bidang ekonomi harus selalu didukung oleh masyarakat dan juga pemerintah Desa.

b. Pembangunan dibidang pendidikan

Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Pendidikan adalah cara untuk meningkatkan taraf sumber daya manusia sehingga menunjang pembangunan, kemudian pembangunan adalah cara yang digunakan manusia untuk menunjang pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pembangunan dibidang kesehatan merupakan hal yang perlu dilakukan untuk menunjang pembangunan desa dengan peningkatan kualitas masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Desa mendukung dalam pembangunan masyarakat dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah cara untuk meningkatkan taraf sumber daya manusia sehingga menunjang pembangunan. Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa masyarakat yang memiliki pendidikan akan mampu membangun masyarakat secara terorganisir. Dengan adanya pendidikan akan mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam era globalisasi pendidikan merupakan kekuatan utama dalam mengimbangi laju perkembangan berbagai bidang.

Hal tersebut diperkuat dalam pembukaan UUD 45 yang tertulis mencerdaskan kehidupan berbangsa. Di Indonesia, metode pembangunannya biasa dikenal pembangunan nasional. Pada Pembangunan Nasional, terdapat lima aspek komponen yang menjadi tujuan akhir, yaitu kemakmuran di bidang material, (2), kesejahteraan fisik dan rohaniyah, kebahagiaan, masyarakat, bangsa yang berkeadilan sosial dan kesejahteraan mental, yaitu kaitannya dengan peningkatan pendidikan melalui penambahan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan dalam hal ini menentukan arah pembangunan nasional. Jika tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih rendah, maka hal ini menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan nasional.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa dengan masyarakat mampu mendukung pembangunan dibidang pendidikan dengan

berjalannya program beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu, agar seluruh masyarakat dapat menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

c. Pembangunan dibidang kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Semakin rendahnya tingkat kematian akibat penyakit, maka semakin sejahtera masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian dari permasalahan yang cukup kompleks di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah Desa memberikan dukungan bagi pembangunan non fisik dalam bidang kesehatan seperti memberikan Kartu sehat agar masyarakat memiliki akses kesehatan yang mudah. Kerjasama yang dilakukan pemerintah Desa kepada Rumah Sehat BAZNAS UII merupakan salah satu upaya pemerintah Desa dalam rangka menyukkseskan pembangunan non fisik.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian milik Rangga (2011) bahwa merealisasikan pembangunan nonfisik perlu adanya peran pemerintah lewat dinas-dinas terkait dalam memberikan bimbingan, stimulasi, dan persuasi kepada masyarakat agar pembangunan nonfisik dapat berjalan dengan baik. Hal ini merupakan salah satu langkah agar kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan nonfisik dapat berjalan dengan baik, sehingga kesejahteraan serta kebersamaan masyarakat untuk mensukkseskan pembangunan, baik pembangunan nonfisik dapat tercapai serta dapat menyelaraskan dengan pembangunan fisik di daerah tersebut.

Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Non Fisik Desa Panggunharjo

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat pisahkan, karena yang

satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Peranan juga dapat di katakan baik apabila pelaksanaan yang dihasilkan sesuai dengan sasaran atau bahkan melebihi sasaran, sebaliknya suatu peranan dapat di katakan buruk apabila pelaksanaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan sasaran atau jauh dari sasaran.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemerintah desa Panggungharjo, yaitu dari segi faktor kepemimpinan dan komunikasi.

1. Faktor Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Model kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin di dalam memimpin warganya maupun di dalam mengupayakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan akan mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat yang akan diberikan terhadap pembangunan di desanya. Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena baik buruknya partisipasi masyarakat bergantung pada pimpinannya. Pimpinan merupakan penggerak orang lain yang akan memimpin, membimbing, dan mempengaruhi agar tercapai hasil yang diharapkan.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Panggungharjo adalah gaya kepemimpinan demokratis karena pendekatan yang digunakan yaitu partisipatif, hal ini dimaksudkan agar terwujud kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan dengan memberdayakan partisipasi masyarakat dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini indikator gaya kepemimpinan Kepala Desa yaitu memiliki ketrampilan dalam memotivasi masyarakat agar bersama-sama melakukan perubahan. Bukti bahwa Kepala Desa turut dalam memotivasi masyarakat yaitu adanya berbagai pembangunan non fisik yang dapat meningkatkan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Selain itu Kepala Desa Panggungharjo memiliki tegas dalam mengambil

keputusan serta berbuat adil didalam pengambilan keputusan ketika terjadi sengketa masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aisia (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini gaya kepemimpinan yang digunakan yaitu gaya demokratis. Gaya kepemimpinan ini cenderung lebih efektif dalam membangun partisipasi masyarakat untuk membangun desa.

2. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia dengan sukarela ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Panggungharjo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya, sudah sangat baik terbukti dengan partisipasi dari masyarakat yang sangat tinggi dalam pembangunan desa, hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam setiap pelaksanaan program-program pembangunan.

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Panggungharjo selain dilakukan dalam sebuah rapat pertemuan dan musyawarah (rembug desa) juga dilakukan pada saat Kepala Desa Panggungharjo melakukan kunjungan ke dusun-dusun yang berada dibawah naungan pemerintah Desa Panggungharjo.

Sehingga diharapkan dengan terjalannya komunikasi yang baik, maka Kepala Desa Panggungharjo akan lebih mengerti kepentingan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, kaitannya dengan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Panggungharjo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Heriyanti (2013) bahwa Program komunikasi yang dilakukan adalah peningkatan keterampilan nelayan dan keluarganya dalam mengelola hasil tangkapan, memperbaiki sikap yang merusak lingkungan dengan mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam, peningkatan kemampuan manajemen usaha penangkapan dan diversifikasi usaha yang disertai penguatan ekonomi keluarga melalui usaha produktif, pengelolaan wilayah pesisir secara

terpadu dengan mengedepankan prinsip sustainability dan kesejahteraan masyarakat, membangun jejaring dengan mitra usaha guna memperbesar armada dan menggunakan alat tangkap yang lebih efektif dan tidak merusak lingkungan.

Peran penting komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah menjembatani kesenjangan yang terjadi antara kondisi masyarakat saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai melalui proses komunikasi yang partisipatif, dialogis dan memotivasi.

Penutup

Kesimpulan

Peranan Pemerintah Desa yaitu (a) menerima aspirasi-aspirasi. (b) Pemerintah desa memberikan solusi dengan cara bertukar pikiran, (c) Upaya pemerintah mencegah masyarakat dalam hal rasa takut dengan cara memberikan bantuan kepastian hukum dan dorongan kepada masyarakat dengan aktualisasi dan penghargaan untuk masyarakat.

Partisipasi masyarakat yaitu (a) partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan analisis kebutuhan berupa diskusi atau sosialisasi, (b) Tahap alternatif program pemerintah seperti kampung mataram, Beasiswa Warga, kartu sehat dan pengelolaan sampah (c) Tahap implementasi program, sudah terealisasi, (d) tahap evaluasi, hasil wawancara belum nampak adanya kegiatan evaluasi pada pembangunan non fisik di Desa Panggunharjo.

Pembangunan Desa Non fisik antara lain (a) Bidang ekonomi, adanya pengembangan pengelolaan sampah dan kampung mataram (b) Bidang pendidikan, program beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu, (c) Bidang kesehatan, memberikan kartu sehat agar masyarakat memiliki akses kesehatan yang mudah.

Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Non Fisik Desa Panggunharjo antara lain (a) Faktor Kepemimpinan, dibuktikan masyarakat dapat mengalami perubahan (b) Faktor komunikasi, dengan kegiatan sosialisasi.

Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Non Fisik Desa Panggunharjo antara lain (a) Faktor Kepemimpinan, pemerintah memiliki gaya kepemimpinan demokratis terwujud dengan memberdayakan partisipasi masyarakat dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan, (b) Faktor komunikasi, akan lebih mengerti kepentingan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya

Rekomendasi

Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah Desa bagaimana peran pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa, yang perlu dilakukan pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa non fisik adalah melakukan bentuk evaluasi secara berkala pada setiap program.

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi pada Program Pemerintah agar terwujud pelaksanaan pembangunan di Desa